

PERAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG
DALAM PENANGANAN KONFLIK

Suwanto Adhi,
Dzunuwanus Ghulam Manar,
Bagus Dwi Pambudi

Jln. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, 1269 (---)
Jln. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, 1269 (ghulam@undip.ac.id)
Jln. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, 1269 (bagusdwipambudi@gmail.com)

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara plural yang kaya akan kebudayaan. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak kebudayaan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai. Namun di sisi lain, hal ini memiliki potensi negatif berupa adanya potensi konflik. Setiap konflik yang terjadi membutuhkan peran negara dalam menanganinya. Dalam skala lokal, konflik yang terjadi di Kabupaten Temanggung ditangani oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung. Fokus penelitian ini ingin melihat bagaimana peran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung menangani setiap konflik yang terjadi. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam serta pengalaman magang yang dilakukan penulis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung tidak memiliki dasar hukum yang secara jelas mengatur kewenangan mereka dalam menangani konflik yang terjadi serta masih kurang optimalnya peran mereka dalam penanganan konflik.

Kata kunci : konflik, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung

ABSTRACT

Indonesia is a rich country in its cultural plural. It's spread in from Sabang to Merauke, there are so many cultures that have different characteristics. Pluralistic society is an invaluable wealth of the nation. But on the other hand, this has a negative effect in form of a potential conflict. Any conflict requires the state role to deal with. In the local scale, the conflict in Temanggung regency must be handled by the Office of National Unity and Political of Temanggung regency. The focus of this research is to describe and explore the role of the Office of National Unity and Political of Temanggung regency in order to handle each conflict. The research was conducted by depth interviews and apprentice experience by the author. The results of this study indicates that the Office of National Unity and Political of Temanggung regency has no legal basis to organize their authority in dealing with conflict, and still less optimal role in resolving the conflict.

Key words : conflict, Office of National Unity and Political of Temanggung regency